

TESIS

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PANGAN STUDI TENTANG
PENGELOLAAN HASIL JAGUNG DI KABUPATEN JENEPONTO**

*FOOD POLICY IMPLEMENTATION STUDY OF CORN PRODUCTION
MANAGEMENT IN JENEPONTO DISTRICT*

NAMA : PAISAL

E 05220 1 004



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PANGAN STUDI TENTANG
PENGELOLAAN HASIL JAGUNG DI KABUPATEN JENEPONTO**

*FOOD POLICY IMPLEMENTATION STUDY OF CORN PRODUCTION
MANAGEMENT IN JENEPONTO DISTRICT*

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi Magister Ilmu Politik

Disusun dan Diajukan Oleh:

PAISAL

E 05220 1 004

Kepada

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**IMPLEMENTASI KEBLIJAKAN PANGAN
STUDI TENTANG PENGELOLAAN HASIL JAGUNG
DI KABUPATEN JENEPONTO**

Disusun dan Diajukan Oleh:

**Paisal
E 05220 1 004**

Telah dipertahankan dihadapan panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin


Pada Tanggal 23 Mei 2023

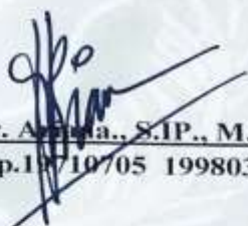
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pendamping,



Drs. H. Andi Yakub., M.Si., Ph.D
Nip. 19621231 199003 1 023


Dr. Anisa., S.IP., M.Si
Nip. 19710705 199803 2 002

Ketua Program Studi
Ilmu Politik,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,


Dr. Anisa., S.IP., M.Si
Nip. 19710705 199803 2 002


Prof. Dr. Phil Sukri, S.IP., M.Si
Nip. 19750818200801 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Paisal

Nomor Pokok Mahasiswa : E 05220 1 004

Program Studi : (S2) Ilmu Politik

Menyatakan dengan sebenar- benarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar- benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersesebut.

Makassar, 13 Juni 2023

Menyatakan

Paisal



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan Tesis ini dapat diselesaikan sebagai salah satu persyaratan akademik dalam rangka penyelesaian studi dan guna memperoleh gelar Magister pada Program Studi Ilmu Politik Sekolah Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, olehnya itu penulis mengharapkan saran dan kritikan membangun untuk perbaikan dalam penulisan Tesis ini. Selain itu, dimulai sejak perumusan awal Tesis ini, pengumpulan data dan informasi hingga penyelesaian Tesis ini telah mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Olehnya itu pada kesempatan ini, izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis: Bapak H. Massiri dan Ibu Hj. Sia atas segala cinta kasih dan pengorbanannya yang tulus dan tak dapat tergantikan sejak awal kehidupan penulis hingga saat ini.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Pemerintah Kabupaten Jeneponto beserta seluruh jajarannya, kepala dinas pertanian dan seleruh jajarannya, kepala dinas ketahanan pangan dan seluruh jajarannya.
2. Dr. Phil Sukri, S.IP,M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanddin.
3. Drs. Andi Yakub, Ph.D Selaku Ketua Daparteman Sekaligus Pembimbing Utama

4. Dr. Ariana,S.IP, M.Si., Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik sekaligus Pembimbing Pendamping .
5. Prof. Dr. Nurlinah, M.Si., selaku penguji sidang Tesis
6. Dr. Sakinah Nadir,.S.IP., M.Si selaku penguji sidang Tesis
7. Dr. Imran., S.IP., M.Si selaku penguji siding tesis
8. Rekan-rekan mahasiswa Ilmu Politik Pascasarjana Universitas Hasanuddin Angkatan 2020
9. Kakak- Kakakku Irmawati dan Suami Herman, M.Ilyas dan Istri Sri Wahyuni termasuk adikku Lisa Massiri terima kasih atas bantuan, motivasi dan doanya selama ini.
10. Kak Surullah, ST (Pendiri OMPI Sul-Sel), Kak Irsang, S.Sos,M.Ikom (Direktur Lembaga Pengkajian Politik), Kak Sapriadi Saleh, S.Kes, M.Kes (Komisioner KPU Kabupaten Jeneponto), Kak Syahrir Sarea (Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Jeneponto), Kak Andi Masnira, Adik Intan Kusumariani, Adik Fauzia Barsas, Adik Alfrida Djufri, Adik Rahmat K, Adik Suaib, yang selama ini menjadi teman diskusi serta yang telah membantu selama proses penelitian.
11. Teman- Teman Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Jeneponto, OMPI SUL-SEL, Lembaga Studi Pemantau Visi Nusantara Indonesia dan Genreta Desa Tanammawang tidak henti- hentinya memberikan ruang kepada penulis.

Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih telah memberikan bantuan, motivasi dan doanya. Semoga Allah SWT membalas kebaikannya. Aamiin.

Makassar, 13 Juni 2023

Penulis

ABSTRAK

Paisal, E 05220 1 004. Implementasi Kebijakan Pangan Studi Tentang Pengelolaan Hasil Jagung di Kabupaten Jeneponto. Dibimbing oleh Andi Yakub dan Ariana

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa upaya implementasi kebijakan pangan di Kabupaten Jeneponto yang dilakukan oleh pemerintah daerah. adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan dan kebijakan public

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif yang menggambarkan secara faktual bagaimana implementasi kebijakan pangan studi tentang pengelolaan hasil jagung yang ada di Kabupaten Jeneponto.

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah membuat kebijakan yang berkaitan dengan pangan jagung dimana implementasi kebijakan tersebut dapat meningkatkan serta mengatur hasil pengelolaan pangan jagung. Pelaksanaan kebijakan mencakup beberapa bagian diantaranya kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program, sumber daya yang digunakan menjadi gambaran dalam mewujudkan pengelolaan pangan jagung yang efektif untuk Kabupaten Jeneponto. Lingkungan Implementasi mencakup kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pangan, Jagung

ABSTRACT

Paisal, E052201004. Implementation of food policy study of management corn yields in Jeneponto Regency. Supervised by Andi Yakub and Ariana

This study aims to analyze and analyze implementation efforts food policy in Jeneponto regency carried out by local government. As for the theory used in this research is implementation policy and public policy.

The method used in this study is a qualitative method describe factually how the implementation of the study's food policy regarding the management of corn yields in Jeneponto Regency.

The results of this study indicate that the efforts made bt the local government it to make policies related to corn food where implementation of these policies can outcomes maize food management. Policy implementation efforts include several parts of which affect interests, types of benefits, degrees changes to be achieved, the location of decision making, program implementation, the resources used are an illustration in realizing management effective corn food for Jeneponto Regency. The implementation environment involves the strengths, interests and strategic actors involved, the characteristics of the ruling institutions and regimes, the level of compliance and response from the implementers.

Keywords: Implementation, Policy, Food, Corn

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.5 Manfaat Teoritis.....	14
1.6 Manfaat Praktis.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	16
2.2 Pendekatan Kebijakan Publik	20
2.3 Teori Implementasi Kebijakan.....	26

2.4 Kerangka Fikir	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
3.1 Tipe Dan Dasar Penelitian.....	36
3.2 Lokasi Penelitian.....	36
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.5 Teknik Analisis Data	40
BAB IV GAMBAR UMUM OBJEK PENELITIAN.....	42
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Jeneponto.....	42
4.2 Potensi Pengelolaan Jagung Kabupaten Jeneponto	44
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
5.1 Keberhasilan Pemerintah Dalam Mengimplentasikan Kebijakan.....	53
5.2 Hambatan Pemerintah Dalam Mengola Pangan Jagung.....	54
5.3 Upaya Pemerintah Dalam Mengelola Pangan Jagung di Jeneponto.....	55
5.4 Upaya Pemerintah Dalam Implementasi Kebijakan Pangan Jagung.....	72
5.5 Implikasi Teori	97
BAB VI PENUTUP.....	107
6.1 Kesimpulan	107
6.2 Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN- LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Luas Tanam, Luas Panen, Produksi Dan Rata Rata Produksi Jagung 2020.....	9
Tabel 1.2 Luas Tanam, Luas Panen, Produksi Dan Rata Rata Produksi Jagung 2022	11
Tabel 1.3 2023	39
Tabel 1.3 Data Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tahun 2006- 2010.....	45
Tabel 1.4 Data Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Jagung di Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 2020.....	46
Tabel 1.5 Luas Tanam, Luas Panen, Produksi Dan Rata Rata Produksi Jagung 2020.....	47
Tabel 1.6 Luas Tanam, Luas Panen, Produksi Dan Rata Rata Produksi Jagung 2021.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tahap Proses Pembuatan Kebijakan Kaitannya Dengan Prosedur Analisis Kebijakan.....	21
Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Mirilee S. Grindle.....	30
Gambar 2.3 Kerangka Pikir Implementasi Kebijakan Pangan Di Kabupaten Jeneponto.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara etimologi pengertian implementasi berasal dari bahasa Inggris yang merupakan *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak dan akibat terhadap suatu objek ataupun berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan ataupun kebijakan yang dibuat oleh institusi pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Mirelee S. Grindle menyatakan bahwa implementasi merupakan suatu proses umum tindakan administratif yang dapat dilihat pada tingkat program tertentu.¹ Implementasi sebagai upaya untuk menciptakan hubungan yang memungkinkan bagi kebijakan dapat terealisasi sebagai sebuah hasil dari aktivitas pemerintah. Upaya-upaya yang dimaksudkan adalah didesain dengan harapan untuk dapat mewujudkan hasil akhir yang telah dipikirkan terkait tujuan dan sasaran dari kebijakan diartikan sebuah program yang bertujuan untuk mencapai hasil akhir yang diharapkan.

Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan

¹Grindle, Merilee S. *Politics And Apolicy Implementation In The Third World, New Jersey, Princetown University, 1980*

yang dimaksud adalah merupakan proses yang dimiliki analisa *bottom up* dalam artian proses kebijakan diawali dengan penyampaian pendapat, dukungan maupun permintaan dari masyarakat. sedangkan implementasi kebijakan di lain sisi memiliki logika *top down* dalam artian penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro.²

Jagung merupakan salah satu komoditas pangan utama sebagai karbohidrat di dunia selain gandum dan padi. Jagung memiliki peran penting untuk berkontribusi dalam ketahanan pangan global. Keberadaan pangan jagung tersebut memungkinkan mengurangi ketergantungan konsumsi terhadap makanan pokok beras selain juga pangan jagung merupakan bahan baku yang sangat baik untuk produksi industri pakan ternak dan lain sebagainya.

Pangan di Indonesia adalah salah satu kebutuhan dasar dan hak dasar manusia, pangan berperan di dalam kebutuhan dan menentukan kualitas sumber daya manusia dan yang lainnya Suatu bangsa yang merupakan bagian utama ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan bukan hanya mencakup tentang ketersediaan pangan yang cukup, melainkan dapat mengakses termasuk membeli pangan dan tidak terjadinya ketergantungan pihak pangan manapun.³ Dengan ini peran pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan begitu juga cara mengimplementasikan kebijakan terhadap pengelolaan pangan maupun yang lainnya.

Pangan merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah daerah yang berdasarkan atas asas otonomi daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan

²Wibawa, Samodra. *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1994

³Ulfa Majid, *Pengembangan Jagung Lokal Dalam Mendukung Ketahanan Pangan*, Penelitian, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku, Prosiding Seminar Nasional Serealia, 2015

sehingga pencapaian ketahanan pangan dan gizi merupakan sebagai sarana penguatan stabilitas ekonomi dan politik, serta jaminan kesediaan pangan dengan harga yang terjangkau dan juga dapat mewujudkan komitmen bangsa untuk ikut serta mewujudkan tujuan pembangunan global dalam menurunkan kemiskinan dan kelaparan.⁴

Indonesia kebutuhan jagung masih didominasi untuk bahan baku seperti keperluan pakan, kemudian keperluan konsumsi pangan dan selebihnya untuk industri dan benih. Selain itu pangan jagung juga bisa dipanen lebih awal sebagai hijauan untuk kebutuhan pakan ternak, dimana hal tersebut terus menerus menjadi pakan ternak, nutrisnya lebih tinggi dan sangat bagus untuk ternak. Setiap tahun pengembangan produksi jagung terus bertambah seiring dengan perkembangan dan kebutuhan manusia. Jagung sebagai bahan konsumsi yang bisa digunakan seperti makanan ringan, susu jagung, es krim jagung, mie jagung, dan juga gula jagung.

Indonesia Memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah, salah satunya adalah kekayaan pada aspek pangan jagung dan menjadi salah satu dari prioritas pembangunan nasional. Pangan jagung merupakan komoditas yang sangat urgen dan strategis terhadap keberlangsungan kehidupan manusia, karena komoditas tanaman pangan sebagian besar merupakan bahan pokok sebagai bahan pangan manusia. Sehingga komoditas tanaman pangan jagung harus selalu tersedia secara kontinyu, terutama pada komoditas yang menjadi pangan pokok sebagian besar manusia seperti padi, kacang dan jagung.⁵

⁴Rachma Maty Fazry Dkk, Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Di Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Volume 6, Nomor 4.*

⁵ Sri Jusnaeni, Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sektor Pertanian Di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto, (*Skripsi Program Ilmu Pemerintahan. Universitas Hasanuddin Makassar, 2017*)

Pembangunan pada sektor pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pangan guna memenuhi kebutuhan industri dalam negeri, meningkatkan ekspor dan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat serta mendorong pemerataan agar dapat mengatasi permasalahan- permasalahan bangsa Indonesia.⁶

Kabupaten Jeneponto secara geografis terletak di ujung barat bagian selatan dari wilayah Sulawesi- Selatan, secara makro merupakan kawasan sentra pengembangan pertanian terkhusus pada sektor pengelolaan jagung, karena secara fisik lahan, agroklimat, ketersediaan infrastruktur dan kelembagaan memungkinkan untuk pengembangan ekonomi produktif yang berbasis wirausaha dan industri hasil- hasil pengelolaan pangan. Dari aspek lain bahwa Kabupaten Jeneponto salah satu pendukung komoditas jagung sebagai salah satu sumber pendapatan utama masyarakat Jeneponto.⁷ Meninjau pada aspek pengelolaan pangan jagung di Kabupaten Jeneponto menjadi topik yang sangat sentral karena mayoritas penduduk rata- rata mampu memproduksi sekian ton sehingga pangan jagung dapat dikelola oleh pemerintah daerah.

Usaha pengembangan sektor pengelolaan pangan khususnya komoditi jagung mempunyai arti penting dalam pengembangan wilayah karena :

- 1) Dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi dan pendapatan.

⁶Mimi Hayat, Dkk, Peran Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Wilayah Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, (*Jurnal S. Pertanian*, Volume 1 Nomor (3), 2017

⁷ Muhammad Anshar. *Peranan Sektor Pertanian Khususnya Jagung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jeneponto*, Tesis, Makassar, Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin, 2006

- 2) Mempunyai potensi pemasaran, baik dalam negeri maupun luar negeri sehingga peningkatan produksi memberikan peningkatan penerimaan devisa yang dibutuhkan dalam pembiayaan kebutuhan pembangunan.⁸

Kaitan dengan pengelolaan pangan jagung di Indonesia, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Jeneponto, telah ditetapkan bahwa pengelolaan pangan jagung merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat, hal ini sesuai dengan kondisi obyektifitas geografi daerah, dimana sebagian besar wilayah Kabupaten Jeneponto adalah wilayah pertanian atau agraris yang menghasilkan berbagai komoditi pertanian termasuk pangan jagung sebagai prioritas utama masyarakat Jeneponto. Bachtiar AK dalam bukunya mengatakan bahwa Dengan adanya kebijakan program yang melibatkan masyarakat salah satunya adalah membangun Jeneponto pada sector pertanian terutama melakukan revitalisasi pertanian.⁹

Berdasarkan surat edaran pemerintah daerah Nomor 180/281/ IV/ 2021 yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi bersama dengan pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam surat edaran tersebut mengimbau agar mengkonsumsi pangan lokal yang ada dan mendorong verifikasi pangan lokal non beras untuk menjamin ketersediaan pangan masyarakat secara mandiri serta menjamin kecukupan gizi untuk hidup sehat, aktif dan produktif maka perlu dilakukan pangan pokok dengan memanfaatkan pangan lokal di Kabupaten Jeneponto.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka kami sampaikan agar dilakukan hal-hal mengenai tentang konsumsi pangan lokal sebagai berikut:

⁸Daradjat Kartawidjaja, *Kebijakan Publik: Analisis Implementasi Kebijakan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*, Bandung, Alfabeta, 2018

⁹Bachtiar AK, *Menyatu Di Hati Rakyat (Biografi Menang Tanpa Mencederai): Revitalisasi Pertanian Jadi Andalan Radjamilo*.Jeneponto.Penerbit Yapensi Radjamilo Media Center, 2011

- 1) Penyajian snack/ pendidikan dan pelatihan serta kegiatan lainnya diwajibkan mengkonsumsi kue- kue/cemilan yang berbahan dasar pangan lokal sebagai sumber utama.
- 2) Menyajikan pangan lokal non beras dan buah- buahan pada setiap kegiatan- kegiatan yang akan dilaksanakan diruang lingkup pemerintah daerah.¹⁰

Dengan itu pembagunan sector pertanian jagung sangat penting dilakukan karena pangan jagung salah satu mata pencaharian masyarakat Jeneponto sehingga peran- peran pemerintah ikut serta membantu masyarakat dalam pengembangan hasil produksi pangan jagung sebagai pangan utama di daerah. Dengan demikian ekonomi merupakan kegiatan- kegiatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan kebutuhan yang dibutuhkan atau yang diinginkan di dalam produksi dan efisiensi terhadap kegiatan- kegiatan yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan kita.¹¹

Kemudian dijelaskan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang pengelolaan cadangan pangan jagung Pasal (1) Ayat (5) Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto. Pasal (6) Ayat (1) Pengelolaan cadangan pangan jagung Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendorong tersedianya penyediaan cadangan pangan daerah di tingkat Kabupaten dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen. Ayat (2) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah bertujuan:

- a) Meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah.

¹⁰ Surat Edaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto, *Tentang Konsumsi Pangan Lokal*, 2021

¹¹James A. Caporaso, David P Levine, *Teori- Teori Ekonomi*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2015

- b) Memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan paceklik berkepanjangan sertaantisipasi kerawanan pangan pasca bencana.
- c) Instrumen stabilitas harga pangan khususnya mengantisipasi guncangan dari pasar domestik maupun internasional.
- d) Meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien terutama pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana dan paceklik berkepanjangan maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.¹²

Pada aspek pengelolaan cadangan pangan jagung sesuai peraturan bupati diatas ditetapkan bahwa ketersediaan pangan jagung dapat membantu masyarakat dalam keadaan terjadi kegagalan panen ataupun terjadi bencana alam akan tetapi secara fakta bahwa kebijakan ataupun peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah tidak sesuai dengan fakta bahwa masyarakat Jeneponto terkhusus yang dialami oleh petani ataupun pengelola pangan jagung justru tidak merasakan efek dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga kebijakan tersebut tidak memberikan dampak positif pada masyarakat petani baik dari stabilitas harga, pengelolaan produksi, segi konsumsi maupun tingkat pemasaran setelah panen.

Dalam Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 8 Tahun 2018 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam pasal 1 Ayat (12) tentang kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai

¹² Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019. Tentang *Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah*. Jeneponto.

tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi lainnya termasuk pertanian jagung.¹³

Salah satu daerah yang masih mengandalkan pada hasil- hasil produksi pangan khususnya jagung, maka sektor pertanian masih memberikan kontribusi terhadap pembentukan produk daerah regional bruto (PDRB) Kabupaten Jeneponto. Produksi pangan jagung di Kabupaten Jeneponto dari tahun ke tahun mengalami perbandingan produksi. Oleh karena itu peningkatan produksi jagung di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2020 bisa dilihat dari tabel dibawah sebagai berikut:

¹³ Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 8 Tahun 2018. *Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*. Jeneponto

Tabel 1.1
Luas Tanam, Luas Panen, produksi, dan Rata- Rata produksi Jagung
Di Kabupaten Jeneponto Tahun 2020

Kode Wil	Kecamatan	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-Rata Produksi (Ton/Ha)
010	Bangkala	7.547	7.507	55.176,45	7,35
011	Bangkala Barat	11.168	11.145	83.810,40	7,52
012	Tamalatea	4.259	4.259	31.942,50	7,50
013	Bontoramba	6.383	6.353	46.059,25	7,25
014	Binamu	5.360	5.265	38.329,20	7,28
015	Turatea	6.507	6.345	45.366,75	7,15
016	Batang	4.194	4.071	31.143,15	7,65
017	Arungkeke	2.907	2.867	21.330,48	7,44
018	Tarowang	4.667	4.665	33.634,65	7,21
019	Kelara	3.886	3.886	29.378,16	7,56

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto 2020¹⁴

Perekonomian Kabupaten Jeneponto masih ditopang oleh sektor pertanian pangan jagung. Tidak salah jika dikatakan bahwa pertanian masih menjadi tumpuan ekonomi mayoritas penduduk Kabupaten Jeneponto. Kontribusi kategori pertanian terhadap PDRB pada tahun 2020 atas harga berlaku mencapai 3,3 milyar rupiah atau sebesar 39,22% meskipun masih terjadi fluktuatif.

Ketahanan pangan jagung merupakan sebuah kondisi terkait dengan pengelolaan aspek- aspek pangan secara menyeluruh. Penelitian prabowo mengatakan bahwa ketahanan pangan meliputi pertama faktor ketersediaan dalam

¹⁴Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto , 2020

artian jaminan pasokan pangan dalam memenuhi kebutuhan secara baik seperti kualitas, kuantitas, keberagaman dan keamanan untuk seluruh masyarakat . faktor kedua adalah sistem distribusi yang efektif dan efisien, sehingga dapat menjamin dan mampu menyalurkan pangan tersebut berkelanjutan dan mempertahankan kestabilan harga. Faktor ketiga adalah memenuhi pola konsumsi masyarakat yang merujuk kepada mutu, gizi, keamanan.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam melihat potensi pangan jagung adalah menginisiasi masyarakat menyediakan beberapa sarana dan kebutuhan dalam bertani seperti penyediaan bibit unggul, sarana pertanian seperti mesim pompa, irigasi dan pembinaan masyarakat di sektor pertanian. Sejalan dengan surut penugasan pemerintah daerah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 501/212/2020 tentang penetapan dan penunjukan satuan tugas ketahanan pangan tahun anggaran 2020. Dalam peraturan bupati dijelaskan bahwa satuan tugas ketahanan pangan jagung Kabupaten Jeneponto bertujuan melakukan koordinasi untuk memastikan ketersediaan produksi, distribusi dan stabilitas harga bahan pangan jagung di daerah khususnya ditengah kondisi penyebaran covid- 19 di Jeneponto. Kemudian melakukan langkah- langkah cepat, tepat, focus, terpadu dan sinergis antar kementrian/ lembaga dan pemerintah daerah.¹⁵

Kemudian data pada tahun 2021 tersebut bisa dilihat dibawah ini. Adapun hasil produksi pengelolaan pangan jagung di Kabupaten Jeneponto meningkat drastic yang dilakukan oleh masyarakat petani jagung pada tahun 2021 sebagai berikut:

¹⁵ *Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 501/212/2020 Tentang Penetapan Dan Penunjukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan Jagung Tahun Anggaran 2020, Jeneponto*

Tabel 1.2

Luas Tanam, Luas Panen, produksi, dan Rata- Rata produksi Jagung
Di Kabupaten Jeneponto Tahun 2021

Kode Wil	Kecamatan	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-Rata Produksi (Ton/Ha)
010	Bangkala	9.846	9.573	70.357,88	7,35
011	Bangkala Barat	12.347	12.298	92.477,20	7,52
020	Tamalatea	4.613	4.029	30.216,75	7,50
021	Bontoramba	6.383	8.236	61.356,71	7,45
030	Binamu	5.303	5.331	39.878,12	7,48
031	Turatea	6.289	4.949	36.867,82	7,45
040	Batang	3.844	3.236	24.753,87	7,65
041	Arungkeke	3.627	2.998	22.301,40	7,44
042	Tarowang	4.712	3.422	25.014,82	7,31
050	Kelara	5.921	4.592	34.714,76	7,56

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto2021¹⁶

Pengelolaan Jagung merupakan salah satu produk pertanian yang bisa dikembangkan sebagai produk agroindustri, karena daya saing yang dimiliki komoditas jagung di skala nasional cukup baik maupun disetiap daerah- daerah terkhusus di Kabupaten Jeneponto. Selain itu jagung merupakan komoditas yang mempunyai kandungan gizi yang cukup tinggi sehingga nilai jual jagung juga cukup meningkatkan nilai ekonomi masyarakat petani.¹⁷

¹⁶Dinas Pertanian Kabupaten Jenepont, 2021

¹⁷Lak Lak Nazhat El Hasanah, Dessy Isfianadewi, Diverifikasi Pangan Olahan Jagung Manis Sebagai Upaya Pengembangan Agroindustri di Desa Soropaten, (*Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol 4, No 1, 2019)

Pengelolaan Jagung memiliki peran strategis terkhusus di Kabupaten Jeneponto. Hal ini mengingat bahwa fungsi yang beraneka ragam baik sumber pangan, pakan serta bahan baku industri. Kabupaten Jeneponto, pemanfaatan hasil olahan Jagung 85% persen untuk dijual diberbagai pedangan maupun perusahaan swasta lainnya. Sebagai daerah yang masuk dalam kawasan penghasil jagung terbesar di Sulawesi- Selatan. Pengelolaan sumber- sumber pertanian yang dihasilkan oleh petani terjadi peningkatan yang sangat pesat, mulai dari pengelolaan pangan jagung sebagai sumber pertanian terbesar di Kabupaten Jeneponto.

Pemanfaatan pengelolaan sumber- sumber pertanian terkhusus jagung di Kabupaten Jeneponto masih dilakukan pada sektor pengelolaam pangan jagung. Kabupaten Jeneponto memiliki lahan produksi yang sangat luas akan tetapi kita masih menilai bahwa sumber- sumber pertanian di Kabupaten Jeneponto terkhusus produksi jagung tidak terkelola dengan baik, karena besarnya produksi jagung setiap tahun tidak menunjukkan adanya peningkatan perekonomian masyarakat. oleh karena itu jagung merupakan pangan terbesar yang ada di Kabupaten Jeneponto, dan tercapainya kesejahteraan dapat diamati dan dikaji seberapa besar peran pemerintah daerah dalam mengelola hasil produksi pangan jagung petani. Besaran produksi jagung yang dihasilkan oleh petani.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di latar belakang, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pangan Jagung di Kabupaten Jeneponto?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan di rumusan masalah di atas, bahwa tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Untuk Menganalisis Bagaimana Implementasi Kebijakan Pangan Jagung di Kabupaten Jeneponto.
2. Untuk Menganalisis Upaya Pengelolaan Hasil Pangan Jagung di Kabupaten Jeneponto

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi untuk pengembangan dan wawasan ilmu pengetahuan, baik kepentingan teoritis maupun kepentingan praktis, berguna untuk mengembangkan kemampuan berfikir dan ide- ide atau gagasan yang akan diuntungkan.

1.5 Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis adalah mengkaji dan mendalami secara ilmiah mengenai kebijakan pemerintah daerah tentang pengelolaan pangan di Kabupaten Jeneponto, serta tambahan ilmu pengetahuan tentang implementasi kebijakan pangan studi tentang pengelolaan hasil jagung di kabupaten Jeneponto. Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat secara teoritis pada pengembangan akademik dalam bidang ilmu politik secara khususnya penguatan pada kajian untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti secara pribadi tentang bagaimana implementasi kebijakan pangan studi tentang pengelolaan hasil jagung di Kabupaten Jeneponto.

- b) Untuk memperdalam ilmu pengetahuan di dunia akademik dan menjadi acuan dan referensi bagi peneliti berikutnya terkait permasalahan yang diangkat oleh penulis sebelumnya.
- c) Untuk kepentingan wilayah akademis, hasil penelitian tersebut akan memperkaya khasanah ilmu politik dan perkembangan keilmuannya, terutama pada judul maupun tesis tentang implementasi kebijakan pangan studi tentang pengelolaan hasil jagung di Kabupaten Jeneponto.

1.6 Manfaat Praktis

Manfaat Penelitian secara praktis adalah memberi pengetahuan dan informasi baru bagi pembaca maupun penulis dan terkhusus pada masyarakat kabupaten Jeneponto serta dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya. Adapun manfaat secara praktis di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Penelitian tersebut diharapkan dapat memberi bahan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pangan di kabupaten Jeneponto yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah kabupaten Jeneponto terkait dengan bagaimana implementasi kebijakan pangan tersebut dapat efektif dan sasaran kebijakan dapat memberi peningkatan segi produksi dan pengelolaan pangan.
- c) Penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi pemerintah daerah kabupaten Jeneponto agar lebih memaksimalkan kebijakan tersebut dijalankan dan diterapkan agar tujuan pengembangan dan pengelolaan pangan tercapai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka adalah pengkajian sumber ilmiah tentang suatu topik tertentu. Tinjauan pustaka atau (*literature review*) memberikan gambaran tentang pengetahuan yang ada saat ini. Tinjauan pustaka ini memungkinkan penulis akan mengidentifikasi lebih jauh tentang penyediaan teori, konsep, metode dan bahan-bahan yang relevan dalam penelitian yang ada.

1.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian Yohanes Pebrian Vianney Mambur (2017) tentang “ kebijakan pemerintah daerah di bidang pertanian dalam hubungan dengan desentralisasi di kabupaten timur tengah utara” menyatakan bahwa yang harus dilakukan oleh pemerintah Timur Tengah utara adalah mengidentifikasi kembali ada ratusan buah, sayur, rempah dan obat yang seharusnya diverifikasi pangan di kabupaten tersebut memiliki banyak sumber daya alam yang melimpah. Tentu yang harus dilakukan oleh pemerintah TTU adalah produksi secara lokal harus di dorong untuk mengurangi ketergantungan dan pola manajemen pangan indonesia jika terjadi krisis di luar negeri, jadikan petani sebagai aktor utama dalam kebijakan setiap produksi pangan, tidak hanya beras, antisipasi penggunaan teknologi kimiawi yang berlebihan dan perlahan gunakan daya- daya alam yang tentunya ramah lingkungan, dan tentunya setelah melewati proses pengeloaan yang memiliki akreditasi akademis, sederhananya untuk meningkatkan kualitas pemerintah harus memikirkan petani- petani profesional yang selain menguasai teknologi yang ramah

lingkungan, juga mampu menghasilkan produksi berkualitas tinggi dan berdaya saing, serta bisa memutus ketergantungan Indonesia dengan negara lain.¹⁸

Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian saat ini adalah lebih kepada mengenai bagaimana pemerintah Kabupaten Jeneponto memahami letak potensi daerah. Pelaksanaan kebijakan dapat meningkatkan hasil produksi yang dihasilkan oleh para petani terkhusus pangan jagung dapat dikelola oleh daerah sebagai jalan keluar agar masyarakat tidak lagi bergantung pada pedagang. Keberadaan pemerintah dalam melihat potensi daerah tentu diharapkan terlibat agar pasokan pangan bisa diatasi disaat harga menurun.

Penelitian Rudy S. Rivai, Dkk, (2011) tentang “konsep dan implementasi pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia” dalam penelitian tersebut mengatakan bahwa konsep yang harus dibangun adalah kemampuan bersaing di pasar global serta mengatasi pelemahan pertumbuhan ekonomi akibat krisis global, memperbaiki citra petani dan pertanian agar kembali diminati oleh generasi, memperkuat kelembagaan usaha ekonomi produktif di masyarakat, menciptakan penyuluh yang efektif- proaktif, mengembangkan sumber perekonomian dan memenuhi kebutuhan pangan.¹⁹

Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian saat ini adalah merujuk pada kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pertanian, dengan adanya kebijakan tentang pangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap produksi pangan pertanian maupun pengelolaan pangan di Kabupaten Jeneponto dapat memberi solusi pada masyarakat dalam mengatasi jika terjadi krisis ekonomi yang dialaminya. Oleh karena itu pelaksanaan kebijakan tentang pangan yang diatur

¹⁸Yohanes Pebrian Vianney Mambur, *Kebijakan Pemerintah Daerah Di Bidang Pertanian Dalam Hubungan Dengan Desentralisasi Di Kabupaten Timur Tengan Utara*, (Jurnal Agribisnis Volume 2, Nomor 2, 2017)

¹⁹Rudy S. Rivai, Dkk, *Konsep Dan Implementasi Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Di Indonesia*, (Penelitian Agro Ekonomi Volume 29, Nomor 1, 2011)

pemerintah daerah, masyarakat lebih mudah meningkatkan pengelolaan produksi pangan lokal.

Djoko Suseno dan Hempri Suyatna (2007) dengan Judul “mewujudkan Kebijakan Pertanian yang pro- petani” dalam penelitian tersebut memberikan gambaran dari beberapa kebijakan pembangunan pertanian yang dilakukan oleh pemerintah ternyata kurang memberikan pengaruh bagi peningkatan keterampilan petani dalam mengelola lahan pertaniannya.²⁰

Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian saat ini adalah melihat peran pemerintah di dalam melaksanakan kebijakan daerah dalam pengelolaan pangan jagung sebagai komoditas unggulan masyarakat jeneponto yang dipercaya kualitas yang memadai sehingga pemerintah harus hadir mengefektifkan sumberdaya alam daerah. Pelaksanaan kebijakan yang dimaksudkan di dalam penelitian ini pemerintah harus pro –aktif melihat potensi daerah karena pertumbuhan ekonomi pertanian di Jeneponto sangat mempengaruhi sumber daya manusia terkhusus para petani jagung.

Penelitian Rossi Prabowo (2010) tentang “ Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Indonesia” dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintah dapat berperan aktif dan dimaksimalkan peningkatkan sektor pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan Indonesia.²¹

Perbedaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah lebih kepada pelaksanaan kebijakan yang dilakukan pemerintah agar pengelolaan pangan terkhusus jagung lebih efektif dan memberi nilai tambah pada masyarakat petani.

²⁰Djoko Suseno dan Hempri Suyatna, *Mewujudkan Kebijakan Pertanian Yang Pro- Petani*, (Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Volume 10. Nomor (3), Maret, 2007)

²¹Rossi Prabowo, *Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Indonesia*, (Jurnal Ilmu- Ilmu Pertanian Volume 6. Nomor 92, 2010)

Penelitian Rachma Waty Fazry (2019) tentang “ Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang” dalam penelitian ini dijelaskan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah belum optimal dan belum berjalan sesuai dengan tujuan. Kemudian sumber daya manusia dan sumber day finansial belum sepenuhnya mendukung.²²

Perbedaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah lebih kepada pelaksanaan kebijakan pangan terkait jagung bisa dikelola oleh pemerintah daerah agar petani lebih dimudahkan proses produksi dan penjualan saat pasca panen tiba.

Perbedaan terhadap penelitian ini adalah dapat dilihat bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dapat mengorganisir pengelolaan pertanian sebagai sumber pendapatan utama masyarakat Jeneponto. Dengan adanya kebijakan yang dilakukan pemerintah apakah memberikan dampak pertumbuhan dan meningkatkan produksi pangan terhadap daerah.

Penelitian Medan Yonathan Mael (2017) dengan judul “ Implementasi kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui program padat karya pangan kecamatan Noemuti” dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa program padat karya pangan (PKP) di timur tengah utara yang direncanakan oleh pemerintah belum maksimal memberikan motivasi dan penyadaran bagi masyarakat akan pentingnya meningkatkan program padat karya pangan (PKP) di lakukan.²³

²² Rachma Waty, (2019), *Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Di Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang*, (Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 6, Nomor 4)

²³Medan Yonathan Mael, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Melalui Program Padat Karya Pangan Kecamatan Noemuti*. (Jurnal Agribisnis Volume 2, Nomor 4, 2017)

Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian saat ini adalah padat karya pangan belum dikelola secara merata, sehingga pemerintah dapat mengintegrasikan hasil pangan yang dilakukan masyarakat, agar dapat diolah dan dibukakan jalur pemasaran yang lebih meningkatkan pengasilan dari pertanian tersebut.

1.2.Pendekatan Kebijakan Publik

Penggunaan bahasa kebijakan seringkali dikaitkan dengan bahasa kebijaksanaan. Kebijakan dan kebijaksanaan mempunyai arti dan makna tersendiri dalam arti konsep maupun konteksnya. Kebijakan merupakan suatu keputusan-keputusan yang dilakukan demi kepentingan masyarakat luas, sedangkan kebijaksanaan adalah alternatif keputusan sebagai bentuk penghormatan atau faktor lainnya untuk memberi rasa kebaikan dan keadilan bagi individu maupun kelompok terhadap proses kebijaksanaan yang dilakukan. Kedua-duanya mempunyai pola tersendiri dalam proses, pelaksanaan dan evaluasinya sehingga harus dibedakan penggunaannya.²⁴

Berbagai definisi tentang kebijakan publik banyak yang diungkapkan oleh pakar dan para ahli kebijakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan bersama. Setiap tindakan kebijakan publik mempunyai proses formulasi dan evaluasi yang mengikutinya dan eksekusinya berada pada level implementasi kebijakan.²⁵

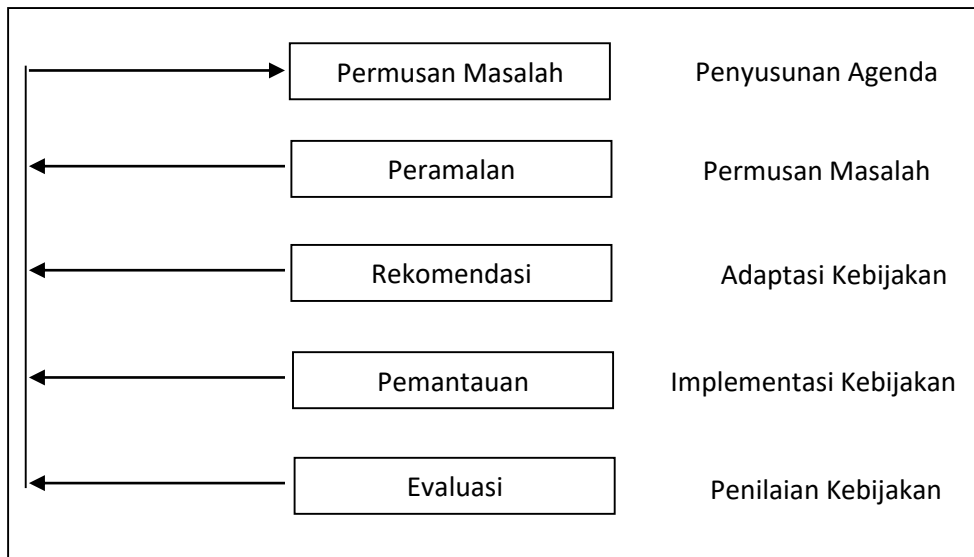
Kebijakan publik merupakan kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam suatu sistem politik, dalam bentuk pengalokasian nilai- nilai pada masyarakat sebagai sarana untuk terpenuhinya kepentingan masyarakat. Alokasi nilai- nilai tersebut dilakukan secara paksa berdasarkan kewenangan yang dimiliki.

²⁴Hayat, Kebijakan Publik: Evaluasi, Reformasi, Formulasi, Malang, Intrans Publishing, 2018

²⁵Ibid, hlm 13

William Dunn memberikan penjelasan dalam tahapan proses pembuatan kebijakan berkaitan dengan prosedur analisa kebijakan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1:
Tahap Proses Pembuatan Kebijakan Kaitannya Dengan Prosedur Analisis Kebijakan William Dunn



Sumber : Buku tentang kebijakan public (H.A. Daradjat Kartawidjaja)

Berikut ini dapat dijelaskan tahapan proses pembuatan kebijakan dan pendekatan prosedur analisa kebijakan sebagai berikut:

a) Perumusan Masalah

Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi- asumsi yang belum jelas, mengdiagnosis faktor penyebab, menentukan tujuan- tujuan yang mungkin dicapai, memadukan pandangan- pandangan yang berbeda dan merencanakan kebijakan baru. Perumusan masalah juga dapat menjadi input yang relevan dengan kebijakan, untuk membahas asumsi- asumsi yang mendasari definisi masalah, sebagai bahan untuk proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda kebijakan.

b) Peramalan

Peramalah dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi dimasa yang akan datang sebagai akibat diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Peramalan dilakukan dalam tahapan formulasi kebijakan.

c) Rekomendasi

Rekomendasi memberikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya di masa mendatang telah diestimasikan melalui peramalan. Ini akan membantu pengambilan kebijakan pada tahap adopsi kebijakan. Rekomendasi juga dapat membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastian menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan dan menentukan pertanggungjawaban administrasi bagi implementasi kebijakan.

d) Pemantauan

Kegiatan pemantauan atau monitoring memberikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap implementasi kebijakan. Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat- akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi dan menemukan letak pihak- pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahap kebijakan.

e) Evaluasi

Evaluasi memberikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan benar-

benar dihasilkan. Jadi ini membantu pengambilan suatu kebijakan dimana pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kebijakan mengenai tentang seberapa besar masalah telah diselesaikan, tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai- nilai dan perumusan kembali masalah kebijakan. Dengan demikian bahwa evaluasi merupakan serangkaian analisis yang membantu memperjelas, mengkritik dan berdebat nilai- nilai yang mempersoalkan dominasi penalaran teknis yang mendasari kebijakan.

William Dunn juga mengemukakan kaitan dengan alur kebijakan bahwa evaluasi atau analisis kebijakan merupakan proses awal dari upaya untuk meningkatkan proses pembuatan kebijakan berikut hasilnya. Itulah sebabnya analisis kebijakan didefinisikan sebagai pengomniasian, penciptaan dan penilaian teknis pengetahuan yang relevan dengan kebijakan²⁶

1) Evaluasi Dan Pengawasan Kebijakan

Dalam siklus perencanaan penyusunan kebijakan itu dimuali dari langkah identifikasi dan perumusan masalah, maka tahapan evaluasi dan pengawasan kebijakan selalu ditempatkan pada kegiatan akhir. Secara konseptual ada beberapa macam jenis pengawasan, demikian juga dengan orang atau lembaga yang bertugas memiliki hak untuk melakukan pengawasan. Dalam implementasi kebijakan ada yang dinamakan pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dari dalam organisasi itu sendiri. Jenis pengawasan ini dibedakan dengan jenis pengawasan ekstrem, yang pengawasan dilakukan oleh aparaturnya pengawasan dari luar organisasi yang bersangkutan.

²⁶Ibid, hlm 56

Secara umum bahwa ruang lingkup sebuah pengawasan dalam kegiatan publik adalah sangat luas, sehingga tidak ada kegiatan publik yang lepas dari pengawasan. Namun dalam proses implementasi kebijakan hak untuk mengawasi kegiatan publik tidak begitu saja dilakukan, baik karenan persoalan dari si pengawas itu sendiri maupun juga persoalan lain.

Demikianlah bahwa dalam proses pengawasan kebijakan itu ada sebuah landasan atau prinsip dasar yang harus disepakati bersama misalnya mengenai metode atau pelaksanaan pengawasan. Metode pengawasan ini antara lain dengan metode pengawasan langsung maupun metode pengawasan tidak langsung, pengawasan formal ataupun pengawasan non formal.²⁷

Oleh karena itu ada beberapa komponen yang harus dimiliki agar dapat dinilai sebagai sebuah kebijakan publik, antara lain sebagai berikut:

- a. Bisa dilihat dari tujuan (*goals*) yang ingin dicapai
- b. Rencana (*plan*) berupa pengertian spesifik untuk mencapai tujuan
- c. Program dan rangkaian acara yang diarahkan untuk mencapai tujuan
- d. Kegiatan, yaitu langkah aksi untuk mereleasasikan program
- e. Akibat kebijakan (*effect*) yaitu dampak nyata kebijakan, baik yang disengaja atau tidak disengaja, positif atau negatif, primer atau sekunder.²⁸

1.3. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *Input*

²⁷Ibid, hlm 69-70

²⁸Ibid

untuk menghasilkan *Output* atau *outcomes* bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika *bottom-up*, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, pemerintah atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika *top-down*, dalam arti penurunan alternative kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro.²⁹

Mirilee S. Grindle mengatakan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administrative yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.³⁰ Sedangkan Van Meter dan Hom mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Kemudian Grindle menambahkan bahwa proses implementasi kebijakan baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Implementasi kebijakan sebuah upaya untuk menciptakan hubungan yang memungkinkan bagi kebijakan dapat terealisasi sebagai sebuah hasil aktivitas pemerintah. Upaya- upaya tersebut didesain dengan harapan untu dapat mewujudkan hasil akhir yang telah dipikirkan. Tujuan dan sasaran dari kebijakan diterjemahkan ke dalam sebuah program yang bertujuan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan.

Singkatnya bahwa implementasi kebijakan sebuah proses untuk mewujudkan rumusan kebijakan menjadi tindakan kebijakan guna mewujudkan hasil akhir yang diinginkan. Kebijakan dalam penelitian ini bermakna juga

²⁹ Wibawa, Samodra. 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta; Raja Grafindo Persada

³⁰ Wibawa, Samodra. 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta; Raja Grafindo Persada

bagaimana langkah- langkah pemerintah dalam menjawab pilihan tindakan yang ditempuh oleh pemerintah terdapat bahwa kebijakan yang diambil dapat berjalan secara terus menerus kemudian dapat diimplementasikan dengan baik.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka kebijakan menurut karakternya adalah langsung mempraktekkan dalam bentuk program- program dalam proses pembuatan kebijakan. analisis kebijakan meneliti sebab, akibat, kinerja dan program public. Kebijakan tersebut sangat diperlukan dalam praktek pengambilan keputusan, dan pengambilan keputusan oleh pemerintah. Program- program yang dilakukan oleh pemerintah senantiasa bisa berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan bisa memajukan daerahnya dalam menghadapi kemajuan masa yang akan datang. Kebijakan tersebut diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

a) Konsep Implementasi

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan public, memiliki dua pilihan langkah yang ada sehingga tercapai diantaranya yaitu langsung mengimplementasikan melalui program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan public tersebut. Rangkaian pelaksanaan kebijakan dapat diamati dengan jelas dimana dimulai dari program ke proyek sampai pada kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim di dalam manajemen tersebut, khususnya manajemen sector kebijakan public itu sendiri. Kebijakan diturunkan berupa program- program yang kemudian diturunkan menjadi proyek- proyek sehingga berwujud pada kegiatan- kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun dalam bentuk kerjasama pemerintah dan masyarakat bawah.

b) Isi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel penting diantaranya adalah isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Dalam variable tersebut meliputi : sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sejauhmana target perubahan yang diinginkan dari kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementatornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik merupakan keputusan- keputusan kelembagaan yang berisikan ketentuan- ketentuan yang biasanya berisi sejumlah tujuan, pedoman, pegangan atau petunjuk dalam bertindak aparatur negara maupun masyarakat.

Menurut Merilee S. Grindle ada dua hal yang sangat menentukan keberhasilan dari implementasi yaitu isi kebijakan yang secara terperinci diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Kepentingan kelompok sasaran
- b. Tipe manfaat
- c. Derajat perubahan yang diinginkan
- d. Letak pengambilan keputusan
- e. Pelaksanaan program
- f. Sumberdaya yang dilibatkan³¹

Isi Kebijakan yang dimaksud adalah apakah pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya. Pencapaian

³¹Ibid 77-78

tujuan dari kebijakan bisa dilihat dari impact atau efek yang ditimbulkan pada masyarakat secara individu dan kelompok, kemudian tingkat perubahan yang akan terjadi dan juga penerimaan kelompok atau perkumpulan ditujukan pada sasaran. Selain itu keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan publik ditentukan oleh tingkat keterlaksanaan kebijakan yang terdiri dari isi kebijakan (*content of policy*) dengan lingkungan implementasi (*content of implementation*). isi kebijakan dapat dilihat dari penjelasan yang meliputi :

1. Kepentingan Kelompok Sasaran (*Interest affected*), adalah kepentingan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan.
2. Tipe manfaat (*Type of benefits*), merupakan jenis manfaat yang menunjukkan manfaat dan dampak positif yang dihasilkan.
3. Derajat perubahan yang diinginkan (*extend of change envision*) yang dimaksud adalah seberapa besar perubahan yang hendak ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan sehingga harus mempunyai skala yang jelas.
4. Letak pengambilan keputusan (*Site of decision making*) merupakan letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan dilaksanakan.
5. Pelaksanaan program (*Program implementer*) merupakan rangkaian program yang harus didukung oleh adanya pelaksanaan yang kompeten, dan
6. Sumber daya yang dilibatkan (*Resources committed*) yaitu sumber daya yang harus mendukung agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik.

c.) Lingkungan implementasi

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari seorang aktor yang terlibat.

2. Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa sebagai lingkungan di mana implementasi kebijakan dijalankan.
3. Kepatuhan dan daya tangkap yang dimaksud adalah sejauh mana tingkat kepatuhan dan respon dari para pelaksana dalam menggapai pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh aktor tersebut.

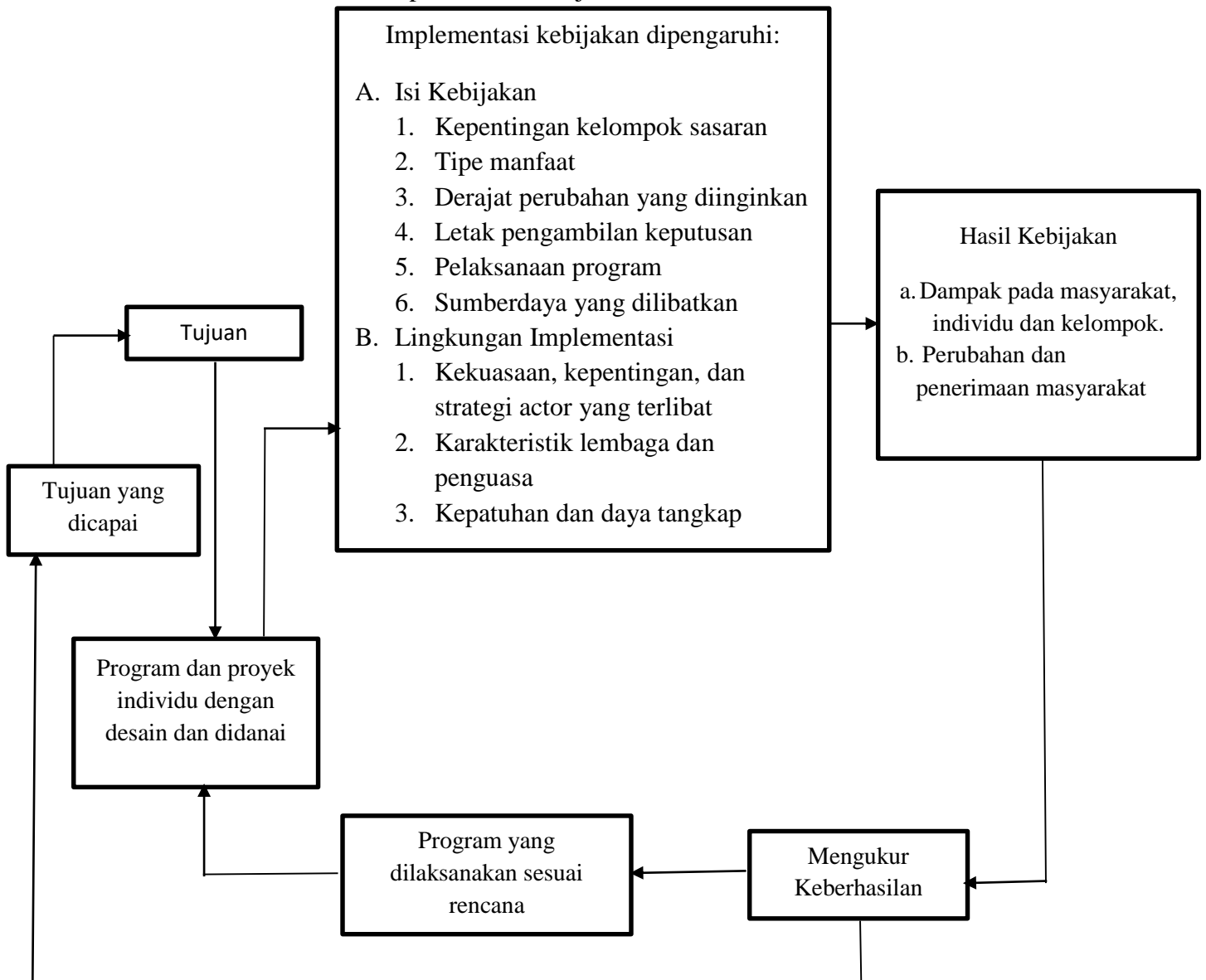
Dalam model implementasi kebijakan publik yang diterangkan diatas sama dengan model implementasi yang akan dijelaskan di dalam model- model tersebut, ada beberapa model yang harus dipenuhi untuk menjadi pedoman atau peraturan agar pada saat pelaksanaan kebijakan tersebut tidak menyimpang dari apa yang sebelumnya dirumuskan. Dimana model implementasi kebijakan merupakan susunan dalam melakukan analisis terhadap proses implementasi kebijakan sebagai jembatan untuk menerangkan situasi dan kondisi yang terjadi setelah kebijakan tersebut ditetapkan sebelumnya sehingga perilaku yang terjadi di dalamnya dapat dijelaskan. Oleh karena itu penggunaan implementasi kebijakan sangat diperlukan di dalam mempelajari implementasi kebijakan. Di dalam implementasi kebijakan ada beberapa gambaran atau model yang harus diperhatikan terkait menjalankan implementasi kebijakan itu sendiri. Pada model tersebut menjelaskan tentang faktor- faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang ditujukan kepada pelaksanaan kebijakan.

Dalam pendekatan yang dilakukan oleh Mirilee S. Grindle terkait dengan keberhasilan pelaksanaan kebijakan bisa diukur dari proses pencapaian hasil akhir dimana tercapai atau tidaknya tujuan yang diraih.³²

³²Ibid 77- 77

Adapun model implementasi kebijakan yang dibangun oleh Mirilee S. Grindle terkait dengan pelaksanaan kebijakan agar terlaksana dengan baik adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2 :
Model Implementasi kebijakan Merilee S. Grindle



Sumber : Buku tentang kebijakan public (H.A. Daradjat Kartawidjaja)

Berdasarkan penjelasan gambar diatas mengenai model implementasi kebijakan Mirilee S. Grindle ini, mengatakan bahwa kebijakan telah dibuat, kebijakan tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai

apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan ataupun para perumus kebijakan tersebut.

Pada gambar diatas dijelaskan bahwa suatu kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai wujud orientasi nilai suatu kebijakan. karena tujuan suatu implementasi kebijakan diformulasi ke dalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan rencana. Implementasi kebijakan atau program secara garis besar dipengaruhi oleh isi kebijakan itu sendiri dan lingkungan kebijakan ataupun konteks kebijakan. tentu keseluruhan kebijakan yang ada tentu dapat dievaluasi dengan cara mengukur luaran program dilihat melalui dampak terhadap sasaran yang dituju baik secara individu maupun secara kelompok masyarakat. Luaran implementasi kebijakan yang dimaksudkan adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok masyarakat atau kelompok sasaran itu sendiri.

b. Proses Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Tindakan tersebut berusaha mengubah keputusan – keputusan tersebut menjadi polarasi pemikiran dalam bentuk operasional serta berusaha mencapai perubahan- perubahan besar maupun kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya adalah sebagai upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan.

Proses implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial. Dalam tataran praktis implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahapan pengesahan peraturan perundang-

undangan, pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana, ketersediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan, dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak, dampak keputusan sebagaimana yang telah diharapkan instansi pelaksana, dan upaya yang dilakukan perbaikan atas kebijakan maupun peraturan perundangan. Proses persiapan implementasi kebijakan setidaknya menyangkut beberapa hal penting yaitu pemyiapan sumber daya, cara atau metode, penerjemah kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima serta dijalankan³³

c. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak factor pendukung dan penghambat yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Dalam penghambat yang terlibat dalam implementasi kebijakan, pandangan Edwards III mengatakan bahwa dapat dipengaruhi oleh empat factor yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan birokrasi. Keempat factor tersebut saling berhubungan satu sama lain.³⁴

Komunikasi satu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsisten informasi yang disampaikan. Sumberdaya juga meliputi empat komponen yang saling berkaitan yaitu staf yang cukup dalam artian murni dan jumlah yang mumpuni, informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program struktur birokrasi didasarkan

³³ Fauzi Yudistira. 2017, Implementasi Kebijakan Publik, [http://www.Scribd.com/doc/32034707/imple
mentasi-kebijakan-publik](http://www.Scribd.com/doc/32034707/implementasi-kebijakan-publik)

³⁴ Wibawa, Samodra. 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta; Raja Grafindo Persada

pada (*standard operating procedure*) yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.

Untuk memperlancar implementasi kebijakan, perlu dilakukan diseminasi dengan baik, syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada empat unsur diantaranya adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk menjelaskan perlunya secara moral memenuhi undang-undang yang dibuat oleh pihak berwenang, adanya kesadaran untuk menerima kebijakan, kesadaran dan kemauan menerima dan melaksanakan kebijakan terwujud manakala kebijakan dianggap logis, keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah, awalnya suatu kebijakan dianggap kontroversial, namun dengan berjalannya waktu maka kebijakan tersebut dianggap sebagai suatu yang wajar.

1.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk memudahkan pemahaman terhadap tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini secara garis besar yang dimaksud yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan pangan Kabupaten Jeneponto dalam.

Dilakukannya mekanisme pembuatan kebijakan pangan demi terarahnya masyarakat pada tujuan lebih baik maka selanjutnya adalah implementasi kebijakan pangan di Kabupaten Jeneponto adalah menerapkan kebijakan tersebut dengan efektif. Penerapan kebijakan tersebut dilakukan agar potensi pangan suatu daerah dapat dikelola oleh daerah.

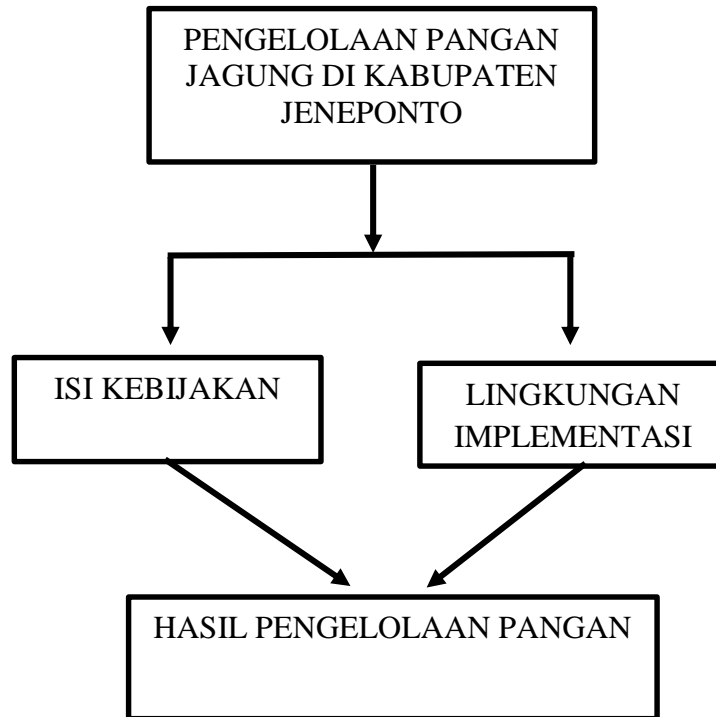
Selanjutnya bisa dilihat dari segi bagaimana produksi pangan jagung dapat dikelola dengan baik, bisa dilihat tingkat produksi pangan jagung, menghitung keuntungan maupun dari segi kerugian setiap tahunnya, bagaimana para konsumen

atau pembeli dapat menikmati hasil pangan tersebut dan melihat dari segi distribusi atau pemasaran dari hasil produksi yang dilakukan oleh petani.

Setelah dilakukan pengelolaan pangan tersebut oleh daerah, maka yang perlu dilakukan adalah produksi pangan dapat diatasi oleh pemerintah sebagai penanggungjawab dalam mengelola produksi pangan maupun pengelolaan pangan daerah. Implementasi kebijakan pangan dan pengelolaan pangan bisa dilihat dari bagaimana kebijakan publik tersebut bekerja dan kebijakan publik dapat diukur dari kebijakan tersebut dirumuskan, kemudian di implementasikan dan kebijakan dapat dievaluasi. Kemudian pengelolaan pangan bisa dilihat dari implementasi kebijakan dengan pendekatan Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, kemudian bisa dilihat Karakteristik lembaga dan penguasa, dan bagaimana kepatuhan dan daya tangkap.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyusun kerangka pikir penelitian ini sebagaimana pada bagan dibawah ini sebagai berikut:

Gambar 2.3 Kerangka Pikir



Kerangka Pikir Hasil Olahan Data